

TIMBANGAN BUKU

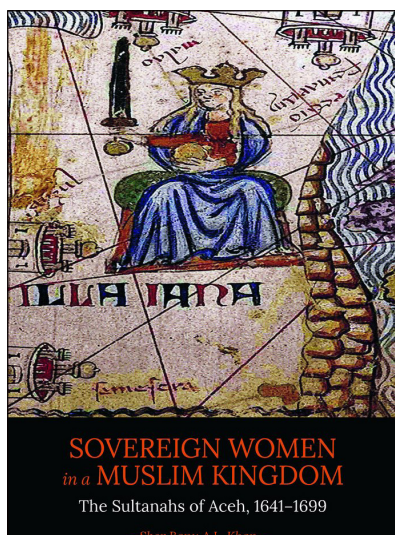
Sher Banu A.L. Khan, *Sovereign Women in a Muslim Kingdom. The Sultanahs of Aceh, 1641–1699*. Singapore: NUS Press, 2017. xvi + 318 pp. ISBN 978-981-4722-20-9. Price S\$38. (paperback)

DOI: 10.17510/paradigma.v8i2.274

Julianti Parani

juliantiparani@ymail.com

NUS Southeast Asia Study Program dan Pensiunan ANRI



Buku berbahasa Inggris ini diterbitkan berdasarkan penelitian Sher Banu A.L. Khan, ilmuwan perempuan muslim, *assistant professor Malay Studies* NUS untuk meraih gelar doktor dari Queen Mary University of London. Penulis itu menggunakan sumber sejarah yang sangat luas untuk mengungkap pemangku pimpinan tertinggi keratuan yang benar-benar mengikuti kaidah agama Islam, efektif, dan ramah (*“truly Islamic, effective and benign”* menurut Anthony Reid, ilmuwan terkenal ahli sejarah Aceh dan Asia Tenggara dari ANU). Sumber sejarah yang digunakan berasal dari berbagai lembaga penelitian: di Inggris, British Library; di Belanda, Universitas Leiden berserta perpustakaanannya dengan lembaga penelitian KITLV, Arsip Nasional Belanda; di Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi dan Yayasan Hasjmy serta Museum Aceh; di Kuala Lumpur, Universitas Kebangsaan dan Perpustakaan Negeranya; dan di Jakarta, Arsip Nasional Republik Indonesia dan perwakilan KITLV.

Yang menarik saya untuk menelaah buku ini adalah peran dan kedudukan perempuan muslim dalam empat sultanah, penguasa tertinggi di Aceh, selama lima puluh delapan tahun pada abad ketujuh belas. Sesuatu yang berarti pula bagi Aceh bahwa telah dikenal kepemimpinan lain yang lebih nyata dalam suatu perjuangan fisik melawan Belanda pada abad ke-19, yaitu tokoh semacam Tjut Nyak Din dan Cut Mutiah.

Buku ini berguna sebagai referensi mengenai sejarah Aceh pada umumnya dan terutama sebagai masukan untuk studi gender. Pandangan penulis buku ini dapat menjadi bahan pertimbangan pembaca dalam melihat kondisi perempuan. Keprihatinan masa kini di Indonesia adalah “perempuan masih dipandang sebelah mata dalam dunia politik”, menurut *Suara Pembaharuan* 31 Januari 2018. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa peran perempuan pada masa milenium baru ini, secara kualitatif cemerlang, seperti dalam pemerintahan, berbagai cabang ilmu pengetahuan, kesenian, usaha niaga, dan pertahanan. Buku ini merupakan usaha yang komprehensif dan berfokus pada empat sultanah Aceh dengan mengemukakan bukti baru mengenai Aceh di bawah kekuasaan perempuan yang belum pernah terungkap.

Buku ini terdiri atas tujuh bab dengan "Introduction" tersendiri yang didahului oleh "Acknowledgements" dan "Preface". Setiap bab membahas topik tersendiri yang terbagi dalam sejumlah subtopik dan diakhiri dengan simpulan bab. Pembahasan tentang sultanah pertama mendapat porsi paling banyak, yaitu tiga bab karena sumbernya cukup banyak dan dilengkapi argumentasi penulis. Sementara itu, tiga sultanah berikutnya dibahas secara terbatas mengingat sedikit yang diketahui mengenai mereka. *Chapter 7*, yang terakhir, berjudul "The End of Female Rule and its Legacy".

Dalam "Introduction" yang sangat luas, Sher Banu memulai dengan menjelaskan bahwa setelah masa keemasan kesultanan Aceh pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607–1636), putrinya Sultanah Safiatuddin Syah menggantikan suaminya Sultan Iskandar Thani (1636–1641) yang wafat dengan tiba-tiba. Ia diikuti oleh tiga perempuan penguasa, Sultanah Nur Alam Naqiatuddin (1675–78), Sultanah Inayat Zakiatuddin (1678–188), dan Sultanah Kamalat Zainatuddin Syah (1688–99). Kemudian, penulis mempertanyakan bagaimana keempat sultanah itu, selama lebih dari setengah abad—enam dekade—memerintah meskipun dapat dianggap sebagai semacam noda "laknat" dalam negara muslim patriakal yang begitu kuat seperti Aceh. Ditambah pula, dalam suatu periodisasi sejarah Aceh, penguasa Aceh berhadapan dengan VOC Belanda dan Kumpehi Dagang Inggris yang bertarung begitu hebat untuk memperkuat kedudukan di kawasan itu. Selain itu, mereka berhadapan dengan berbagai kerajaan di Semenanjung Malaya.

Penjelasan selanjutnya tentang ruang lingkup tesis mengenai asal mula, sifat serta pengaruh kekuasaan keperempuanan itu, juga dalam kungkungan adat dan agama Islam; pandangan tradisional antara keperkasaan lelaki dan kesalehan perempuan dalam kerajaan di Asia Tenggara; hubungan Aceh-VOC dalam perspektif interaksi yang setara kekuatannya; mempermasalahkan kemunduran Aceh di bawah kekuasaan para sultanah seperti disebut-sebut dalam penelitian terdahulu; memperbandingkan berbagai berita dari sumber VOC Belanda, Kumpehi Inggris, naskah tradisi Melayu, dan kisah perjalanan orang Eropa dan musafir muslim dari Iran dan Mekah yang berhubungan dengan Aceh. Bukti baru dalam penelitian ini memberi pemahaman baru tentang peran perempuan dalam menunjang perkembangan di Daerah Istimewa Aceh. Bukti itu dapat menjadi inspirasi bagi kepemimpinan perempuan muslim pada masa kini di Asia seperti alm. Benazir Bhutto (Pakistan), Khaleda Zia dan Sheikh Hasina Wajed (Bangladesh), Megawati Sukarno Putri (Indonesia, dan Wan Azizah Ismail (Malaysia). Studi ini telah memberi kedalaman pengetahuan mengenai perempuan yang mencapai kedudukan politis tinggi dan penuh dengan tantangan serta oposisi di pihak lain: apakah itu karena dipersilakan kaum lelaki, faktor sejarah dan tradisi, struktur institusional, kompetensi adaptasi dalam perkembangan global atau karena kemampuan istimewa dari diri sendiri.

Chapter 1 – "The Succession of the First Female Ruler of Aceh" berisi lima subbab yang membahas suksesi penguasa perempuan pertama di Aceh. Kriteria suksesi politis di Aceh, sebagaimana tercantum dalam "Kanun Syarak Kerajaan Aceh", atas dasar undang-undang Syariah yang menyatakan bahwa kandidat harus muslim, dari keturunan yang baik, seorang dewasa, penduduk asli Aceh, berani, bijaksana, adil, kasih sayang dan lembut hati, pandai berbicara, dapat memenuhi janji, secara fisik tidak cacat, bersikap benar, sabar, dapat menguasai amarah, memiliki sikap pengampunan, tegas tetapi patuh pada kehendak Allah serta bersyukur kepada Allah (Usman, "Kanun Syarak Kerajaan Aceh", 38).

Pada umumnya memang tidak mungkin memenuhi semua kriteria kualifikasi tersebut, tetapi ada faktor tertentu yang menentukan suksesi politis dan mengapa pada 1641 perempuan dapat menjadi penguasa secara berturut-turut hingga 1699. Dalam kebingungan menyadari kondisi itu, dipercayai bahwa kesultanan Aceh yang bermula pada abad keenam belas—diperintah oleh kaum lelaki saja—dengan menggabungkan dua kerajaan kecil. Kerajaan itu berkembang dengan menaklukkan daerah baru melalui paksaan ataupun secara damai dengan perkawinan antarelite kerajaan, baik secara damai maupun paksa melalui pengkhianatan,

pembunuhan, dan penyingkiran, hingga seorang pemberani muncul dan naik takhta, Iskandar Muda pada 1607.

Ia telah meluaskan wilayahnya ke Pahang, Semenanjung Malaya, juga berani melawan Portugis di Malaka, sebagaimana terutama tertulis dalam Hikayat Aceh dan naskah *Bustan us-Salatin*. Sultan Iskandar Muda wafat pada 1636 tanpa meninggalkan putra mahkota sehingga anak menantu, Iskandar Thani dari Pahang, naik takhta. Ia adalah suami Putri Seri Alam, anak kandung Iskandar Muda.

Sultan Iskandar Thani memerintah dalam jangka waktu pendek, wafat masih muda pada umur 31 tahun, pada 1641, tanpa keturunan. Wafatnya misterius, konon kabar diracuni; berita orang Belanda meyebutkan pula bahwa karena tidak disukai oleh elite kerajaan, tetap dianggap orang asing (Pahang), dan memiliki sifat boros: menghabiskan uang kerajaan, suka membeli perhiasan mahal; seorang pemimpin buruk, dan merugikan kerajaan.

Maka, anak perempuan Iskandar Muda, janda Iskandar Thani naik takhta sebagai penguasa perempuan pertama di Aceh. Ia bergelar Taj al-Alam Safiatuddin Syah dan memerintah selama tiga puluh lima tahun sampai wafat. Meskipun demikian, sebelum ia dinobatkan, ada perdebatan mengenai status keperempuannya—selama tiga hari—di kalangan pendukungannya: di antara Orang Kaya Kerajaan dan para ulama tinggi, tetapi dapat diselesaikan dengan damai.

Subtopik berikutnya membahas keadaan yang mendorong suksesi penguasa perempuan pertama Aceh itu; bagaimana adat kemusliman mengizinkan perempuan dalam suksesi kerajaan serta dasar legitimasinya dengan mengambil contoh kasus lain, seperti Sultanah Raditya yang bertakhta di Delhi pada 1236, juga di Irak pada zaman Dinasti Mongol Jallarid, kemudin Patani menurut Hikayat Patani, serta di Indonesia pada abad ke-17 hingga ke kerajaan nonmuslim seperti di Tiongkok yang mengutuk ratu Wu Xetian 686–93; dan yang paling ekstrem di Afrika Ratu Njinga dari Ndongo, Matamba 1624–63 mengatasi hambatan ketidaksahan gender perempuannya yang berusaha berlaku menjadi lelaki dan suami serta selir-selir lelakinya dituntut untuk berpakaian perempuan. Bagaimana pula konsepsi adat tradisional Aceh (yang lebih fleksibel, menurut peneliti) dalam suksesi perempuan itu diakhiri dengan konklusi mengapa dapat terjadi pada 1641.

Chapter 2 - "Sultanah Safiatuddin's Early Years: Keeping Afloat". Kesebelas subbabnya terutama membahas negosiasi yang alot tentang permasalahan yang ditinggalkan dalam pewarisan Sultan Iskandar Thani, suaminya, yaitu order sejumlah perhiasan mahal dari Eropa sebelum ia wafat. Berita itu terutama diperoleh dari laporan duta VOC-Belanda, seperti Soury dan Vlamingh, yang berusaha untuk mendapatkan harga setinggi mungkin, di samping peran Orang Kaya Aceh yang menekankan pembayaran serendah mungkin. Dalam bab ini secara panjang lebar negosiasi harga perhiasan itu digambarkan dalam suasana upacara pemakaman Sulktan Iskandar Thani yang mewah.

Pada masa pemerintahannya, ia menyukai perhiasan sebagai regalia kerajaan, juga perjamuan diplomatis yang diselenggarakan Sultanah dalam menyambut duta-duta VOC yang datang membawa perhiasan itu. Dalam negosiasi itu, berperan penting adalah para Orang Kaya Aceh yang saling bertentangan, kadang penuh dengan konflik di antara mereka, juga pembantu lain Sultanah, semacam abdi dalem: *eunuchs*. Akhirnya, konflik dapat diselesaikan dengan diplomasi yang baik oleh sikap dan kebijakan Sultanah sendiri. Itulah "ujian pertama" yang meluluskannya dalam menunjukkan kepiawaiannya memimpin sekalipun keperempuannya diperdebatkan pada awalnya.

Chapter 3 - "Sultanah Safiatuddin's Maturing Years: Politics of Consolodation". Tujuh subbab membahas dinamika kebijakan Sultanah pada dua dekade pertama yang berhadapan dengan ketidaksatuan Orang Kaya Kerajaan serta desakan VOC dalam perdagangan di kedua daerah vasal Aceh, yaitu timah di Perak dan merica di Sumatra Barat. Ketangguhan Sultanah diuji demi mempertahankan kedaulatan Aceh

serta menegakkan kekuasaan terhadap vasalnya meskipun diliputi berbagai pergolakan di istananya yang dapat menggoyangkan eksistensinya sebagai penguasa Aceh.

Dalam periode tahun 1640-an dan 1650-an, Sultanah Safiatuddin mengalami banyak krisis, terutama dalam berhadapan dengan VOC Belanda dan pertikaian penguasaan perdagangan di daerah vasalnya, yaitu Perak di Senanjung Malaya. Di satu pihak Belanda ingin menguasai monopoli perdagangan timah di Perak, di pihak lain berhadapan dengan Orang Kaya Aceh, seperti Laksamana yang anti Belanda dan Maharaja Sri Maharaja yang pro Belanda. Ditambah lagi ia menghadapi vasalnya Sultan Muzaffar Shah dan Temenggung, serta Orang Kaya Besar dari Perak. Muncul juga konflik dengan pedagang muslim India dari Gujarat yang sejak dulu berhubungan dengan Aceh, terutama menjual-beli gajah yang menguntungkan Aceh. Merekalah yang telah membunuh dan menawan para pejabat Belanda yang berada di Perak. Kemudian, di istananya sendiri, Sultan Safiatuddin berhadapan dengan gejolak pertikaian antara Orang Kayanya hingga difitnah berselingkuh dengan penguasa ulama tertinggi Sheikh Syaiful Rijal, pengganti Al Raniri yang telah pergi dari Aceh pada 1644. Ia berhasil keluar tanpa terluka sedikit pun untuk mengonsolidasi posisinya di atas takhta Aceh, mengatasi badai politis, dan bertahan hingga akhir hayatnya.

Menurut pendapat Sher Banu, Orang Kaya Kerajaan menyadari bahwa tidak ada di antara mereka yang cukup kuat untuk menggantikan Sultanah di atas takhta Aceh, dalam menjaga keseimbangan kekuasaan terutama menghadapi Belanda. Meskipun pihak Belanda mengganggu Sultan Safiatuddin pandai mengikuti angin, yang dapat dianggap sebagai kelemahan, justru karena kekuatan fleksibilitasnya ia berhasil keluar sebagai pemenang.

Chapter 4 – “Ties that Bind? Aceh’ Overlord- Vassal Relations”. Tiga belas subbab menjelaskan bahwa Sultanah melanjutkan hubungan kevasalan dengan Perak serta dengan Sumatra Barat dalam perdagangan merica meskipun pada akhirnya terlepas dan dapat direbut VOC. Hubungan Aceh dengan Perak pada masa kesultanan Safiatuddin banyak dinilai oleh penelitian terdahulu sebagai mengalami kemunduran karena faktor sultan perempuan. Namun, Sher Banu dapat membuktikan bahwa justru kekuatan kepribadian Sultanah ini membuatnya mampu bertahan dalam mempertahankan kekuatan Aceh. Ia pandai menemukan celah berarti dalam pertarungan perdagangan timah terutama dan lainnya, seperti tenunan India dan perdagangan gajah. Munculnya Inggris dapat lebih menarik perhatian Aceh daripada Belanda meskipun Belanda lebih kuat kedudukannya di Semenanjung setelah menguasai Malaka pada 1641. Demikian pula halnya pertikaian kekuasaan di istana Sultan Perak setelah ia wafat pada 1654. Sultanah Safiatuddin dan elite Aceh berhasil mempertahankan hubungan patron-klien di Perak dengan sistem tradisional.

Hubungan Aceh dengan Perak memang dapat diselamatkan meskipun pertarungan kekuasaan perdagangan cukup sengit. Namun, tidak demikian halnya di Sumatra Barat. Sumatra Barat, sejak zaman Iskandar Muda, dikuasai perdagangan merica dan emas. Pada masa itu Iskandar Muda bermain politik dan memilih teman di antara Portugis dan Belanda. Namun, setelah Portugis kalah melawan Inggris, ia diganggu oleh pedagang dari India.

Untuk mempertahankan kedudukan Aceh, Iskandar Muda telah menempatkan para panglima Aceh di wilayah Sumatra Barat yang tidak disukai oleh orang Minang sendiri. Dalam perkembangannya, VOC di Sumatra Barat dapat mengalihkan perannya dari “pedagang” menjadi “pelindung”, terutama setelah Perjanjian Painan pada 1663 antara VOC dan Sumatra Barat.

Meskipun demikian, Sultanah Safiatuddin berusaha melawan gejala itu dengan memperkuat hubungan dengan Inggris yang tidak bersedia mempererat hubungan dan mengirim duta persahabatan ke Siam dan Johor. Hingga wafatnya pada 1675 kekuatan Aceh dapat dipertahankan di kawasannya dan juga dapat dilanjutkan oleh penggantinya Sultan Zakiatuddin meskipun senantiasa mengalami gangguan yang makin meningkat dari kekuatan Eropa.

Chapter 5 – “Female Rulers Negotiating Islam and Patriarchy”. Kesepuluh subbabnya terutama membahas praktik agama dan budaya Islam pada masa kekuasaan Sultan Safiatuddin selama 34 tahun. Ia berkuasa lebih lama daripada ayahnya yang lebih terkenal, Iskandar Muda. Suatu gaya kepemimpinan yang berbeda dari para pendahulunya, yang dilanjutkan oleh ketiga sultanah berikutnya meskipun tidak banyak berita yang tertinggal dari para penggantinya itu.

Dalam bab ini Sher Banu menjelaskan kekhasan gaya kepemimpinan Islam Sultanah Safiatuddin dilihat dari berbagai segi. Ia menggunakan berbagai sumber tulis dari Barat (Belanda), penelitian dan argumentasi dari tokoh selebriti semacam Anthony Reid, Anabell Gallop Teh, dan Takashi Ito; dan dari sumber Islam, seperti Hikayat Aceh dan Bustan us-Salatin, serta dari peneliti Indonesia sendiri, seperti T. Ibrahim Alfian dan Amirul Hadi.

Gaya kepemimpinan Islam dibandingkan dengan yang dari kerajaan Ottoman di Turki dan kesultanan Mongol dari India dan Asia Tengah, terutama untuk menjelaskan keunikan ataupun kekuatan di salah satu pihak dibandingkan pendahulunya Sultan Iskandar Muda dan Iskandar Thani, ataupun sultan lain. Gaya kepemimpinan Islam yang dipantau melalui surat-menyurat kerajaan, tulisan pada cap meterai dan uang, terutama dalam gelar kehormatan serta salam pendahuluan (*salutations*) dalam surat kerajaan. Juga kebijaksanaan dalam memutuskan di forum peradilan berbagai kriminal dari pencurian sederhana sampai pembunuhan, perselingkuhan hingga pengkhianatan terhadap kerajaan. Ia bijaksana untuk senantiasa mengikutsertakan pertinggi kerajaan serta Orang Kayanya, tetapi berani dengan tangkas mengambil keputusan pada akhirnya.

Jika Iskandar Muda dan Iskandar Thani cenderung memperlihatkan gaya kepemimpinan yang otokratis dan adakalanya cenderung lebih kejam daripada apa yang tercantum dalam hukum Syariah, Safiatuddin lebih demokratis tetapi tetap berpegang pada aturan dan norma agama Islam. Itulah rahasia kekuatan Sultan Safiatuddin sehingga mampu bertahan di atas takhta dan menjaga keseimbangan berbagai perbedaan dan kontestasi antarelite kerajaan. Dia dapat mengatasi stigma perempuan dalam menghadapi kekuatan dominasi politis dari keburukan emosi patriarki. Sultan Safiatuddin, sebagai perempuan juga pandai menempatkan diri dalam berbagai perayaan di istana, di tempat umum, di depan khalayak ramai, ataupun dalam berbagai ritual atau perayaan agama Islam di masjid.

Kemudian, Sher Banu membandingkan berbagai pendapat tentang sikap penguasa atau sultanah perempuan di depan publik dengan bersumber pada kitab Taj us-salatin, Bustan us-salatin, Sejarah Melayu, catatan seorang musafir muslim, duta dari Belanda dan Inggris. Semuanya menjelaskan, sesuai dengan ketentuan agama Islam, selalu menutupi muka atau menempatkan diri di belakang tirai, belakang pintu, atau jendela. Sultan Safiatuddin yang sering keluar, berburu, menangkap ikan dan melakukan perjalanan hiburan, selalu menutup muka dengan kain tipis. Sebaliknya, penggantinya Zakiatuddin yang naik takhta dalam usia yang lanjut, 60 tahunan, jarang keluar dan senantiasa di dalam istana saja. Duta Inggris Thomas Bowrey malah menyebutnya "*old Maid*" (perawan tua). Adat kebiasaan menutup muka bagi perempuan diduga berumur lebih tua daripada aturan kebiasaan menurut agama Islam dan mungkin berasal dari adat kebiasaan di Persia dan dari tradisi Sassanid.

Pada akhirnya, Sher Banu mempertanyakan mengapa kekuasaan perempuan di Aceh berakhir pada 1699. Elite kesultanan telah menurunkan Sultanah keempat Sultanah Kamalat Syah atas dasar dugaan fatwa yang melarang seorang perempuan menjadi penguasa kerajaan.

Chapter 6 – “The Practice of Queenship”. Sembilan subbabnya terutama membahas perilaku tiga jenis kepemimpinan berdasarkan konsep Robert Bartlett dan Anthony Reid yang mengidentifikasi tiga tahap atau jenis perkembangan kekuasaan raja di Aceh pada 1550–1700. Secara garis besar kepemimpinan pertama yang absolut atau otoriter (*ira et malevolentia – wrath* [murka] and *malevolence* [dengki]). Kemudian ada kepemimpinan dengan kepentingan kedaulatan (*sovereignty*) dan pada akhirnya kepemimpinan untuk

kedamaian serta melindungi rakyat (*pax et custodia*). Sambil membandingkan penelitian Anthony Reid dan naskah Adat Aceh, Sher Banu menggambarkan bagaimana kekuasaan para raja Aceh bekisar dari desentralisasi dan kemundurannya atau menuju resentralisasi antara wilayah gampung (desa), mukim (distrik), dan nangroe (negeri). Bagaimana keadaan sebelum dan selama keempat sultanah berkuasa. Kemudian ia mengemukakan Qanun al-Asji Darussalam dari naskah Hamka “Dewan Perwakilan Rakjat Aceh di abad Ketujuhbelas” (1963), yang menggambarkan kewajiban yang harus diemban penguasa Aceh yang memerintah kerajaannya. Sher Banu menjelaskan bahwa, pada masa keempat Sultanah, ada pergeseran menuju ke suatu kekuasaan monarki yang terbatas dibandingkan masa kekuasaan Iskandar Muda dan Iskandar Thani, tetapi tidak seberapa jelas pergeseran perubahannya. Jelas bahwa pada masa kekuasaan keempat Sultanah ada kolaborasi antara penguasa kerajaan dan petinggi kerajaan sebagai suatu ciri sistem politis.

Hal lain dari masa kepemimpinan empat Sultanah tersebut yang merupakan ciri pemerintahan yang menonjol adalah keberadaan suatu jaringan perempuan dan *eunuch*—orang kasim sebagai kepercayaan khusus untuk mengimbangi kaum elite patriarkhal kerajaan yang berang terhadap perempuan. Kemudian, penguatan politik penghiburan (*politics of entertainment*), bagaimana melaksanakan upacara hiburan penghormatan pada para duta asing seperti kebiasaan di istana Otoman dan Muhgal dengan pesta pora, tarian, dan perayaan dengan makanan manisan-manisan, buah-buahan eksklusif, termasuk parade ataupun perlombaan dan kompetisi gajah dan harimau. Tidak ketinggalan pesta perburuan dengan berbagai *amusement* seremonialnya. Pesta pora yang banyak itu dihadiri juga oleh orang asing dari luar negeri.

Chapter 7 – “The End of Female Rule and Its Legacy” membahas dalam subbab tersendiri wafatnya Sultan Safiatuddin dan berturut-turut ketiga suksesi pemimpin perempuan lain. Kemudian, penulis membahas penguasa perempuan terakhir di Aceh, yaitu Kamalat Syah, dan mempertanyakan mengapa kekuasaan perempuan hanya berlangsung pada 1641–1699 dan tidak pernah terjadi lagi. Mengapa perempuan dapat berkuasa hanya enam dekade di Aceh dalam perbandingan dengan pemerintahan muslim lain. Menekankan pertemuan Aceh-VOC dengan melihatnya sebagai pemunculan kekuatan yang interaktif. Kekuatan persahabatan kekeluargaan dalam dunia muslim Melayu. Pada akhir konklusi, ia menyatakan keterbatasan sumber bagi masa pemerintahan ketiga Sultanah setelah Safiatuddin. Meskipun demikian, Sher Banu menganggap bahwa bahwa ciri kepemimpinan Sultanah Safiatuddin signifikan, baik bagi gender perempuan maupun lelaki, terutama dalam menghadapi kekuatan yang dapat kontradiktif di sekitar kekuasaan negara. Ia juga mengharapkan penelitian lebih banyak tentang kepemimpinan di lingkungan Asia Tenggara pada masa lalu, khususnya peran perempuan, agar menjadi masukan bagi perkembangan kepemimpinan perempuan pada masa kini.